

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006* .
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen* . Jakarta: Salemba Empat.
- Anzarsari, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Pulau Sumba. *JAFFA* , Vol. 04, No. 1: 1-17.
- Artha, R. D., Prayitno, B., & M.T, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi* , Vol. 11, No. 2: 214-229.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* , Vol. 3, No. 2: 75-87.
- Heriningsih, S. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi dianalisis dari Opini Audit. *Publikasi Ilmiah*. Surakarta: LPPM UMS.
- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. *Buletin Ekonomi* , Vol. 11, No. 1: 1-86.

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kiswanto, & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, *Leverage*, Temuan Audit, dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 3, No. 1: 44-54.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyana, B., Subkhan, & Slamet, K. (2006). *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: LPKPAP.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 20-23 September 2012* .
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* , Vol. 8, No. 1: 1-19.
- Prakosa, K. B. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI* , Vol. 8, No. 2: 101-118.
- Sedyaningsih, P., & Zaky, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah* , Vol. 3, No. 2: 1-14.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* , Vol. 3, No. 4: 553-562.
- Siddi, P. (2016). Peran Karakteristik Keuangan dan Opini Audit dalam Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* , Vol. 7, No. 3: 419-436.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). *Journal of Accounting* , Vol. 2, No. 4: 1-13.

Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing* , Vol. 8, No. 1:1-94.

Sutaryo, & Carolina. (2014). Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram, Lombok 24-27 September 2014* .

Widagdo, A. K., & Munir, M. B. (2017). Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , Vol. 20, No. 2:303-330.

Sumber Lain

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.bpk.go.id>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2012). *Laporan Realisasi Anggaran*. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2013). *Laporan Realisasi Anggaran*. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2014). *Laporan Realisasi Anggaran*. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Republik Indonesia. (2016). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014*. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.otda.kemendagri.go.id/>

Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015*. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.otda.kemendagri.go.id/>

Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan*

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Dipetik 11 Juli, 2019, dari <http://www.otda.kemendagri.go.id/>

Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Legalitas

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*. Jakarta: Legalitas

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Legalitas

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Legalitas

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Legalitas

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Legalitas